

PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Putu Cesary Kurniauri
Universitas Lampung
E-Mail: cesakrnia@gmail.com

Abstrak – Tujuannya penelitian ini adalah untuk menguji serta menganalisis pengaruh akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa serta partisipasi masyarakat pada kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Fenomena yang melatarbelakangi studi ini adalah pentingnya tata kelola dana publik yang akuntabel serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mendorong keberhasilan pembangunan desa guna meningkatkan taraf hidup warga. Metodologi riset dipakai yakni kuantitatif dengan pendekatannya asosiatif. Datanya didapat dengan menyebarkan kuesioner pada partisipan di Kecamatan Candipuro dan diolah menggunakan alat uji SEM-PLS 4. Teknik analisa data cakupannya yaitu evaluasi outer model serta inner model untuk menguji hipotesa studi. Temuan memperlihatkan: (1) Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh positif signifikan pada kesejahteraan masyarakat dengan nilainya T-Statistic yakni 2,050 serta P-Value 0,040. (2) Partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan pada kesejahteraan masyarakat dengan nilai T-Statistic yakni 4,280 serta P-Value 0,000. Temuan memperlihatkan semakin baik akuntabilitas pengelolaan dana desa serta semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Candipuro akan semakin meningkat.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Kesejahteraan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa menjadi salah satu fokus utama pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk pengelolaan sumber dayanya serta keuangan desa secara mandiri. Implementasi kebijakan tersebut diperkuat dengan diberlakukannya UU No.06 Tahun 2014 terkait Desa memberi ruang bagi desa dalam melaksanakan pengaturan serta mengurus kepentingan masyarakat sendiri melalui pengelolaannya ADD.

Pemerintah desa bertanggung jawab untuk mengawasi alokasi dana yang dikenal sebagai ADD, yang bersumber dari APBN dan diproses melalui APBD kota dan kabupaten. Sesuai dengan peraturan keuangan desa, ADD digunakan untuk membiayai operasional pemerintah desa, pelaksanaan proyek pembangunan, pengembangan masyarakat, serta pemberdayaan warga setempat (Permendes, 2020). Diperkirakan bahwa dana desa akan menjadi sarana pembangunan yang akan meningkatkan kualitas layanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur desa, mendorong pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Jika tujuan pembangunan desa dapat terwujud sepenuhnya, itu menjadi hal yang sangat penting agar keuangan desa dikelola secara bertanggung jawab dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Untuk memastikan bahwa dana desa digunakan dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, akuntabilitas menjadi hal yang esensial agar pemerintah desa dapat dimintai pertanggungjawaban secara transparan atas pengeluaran mereka. Untuk memastikan bahwa inisiatif pembangunan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat, keterlibatan masyarakat sangatlah penting pada setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program desa.

Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan adalah satu diantara banyaknya wilayah yang menerima ADD dengan jumlahnya cukup besar tiap tahunnya. Berdasarkan data

pagu Dana Desa tahun 2021-2025, lima desa yang menjadi objek penelitian yaitu Desa Rawa Selapan, Bumijaya, Titiwangi, Beringin Kencana, dan Trimomukti menerima dana desa dengan nilai yang terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Berikut data pagu Dana Desa di lima desa yang menjadi objek penelitian tahun 2021-2025:

Tabel 1 Pagu Dana Desa Kecamatan Candipuro tahun 2021-2025

No	Desa	2021	2022	2023	2024	2025
1	Beringin Kencana	1.132.083.000	1.180.743.000	1.494.501.000	1.384.900.000	1.234.753.000
2	Rawa Selapan	929.559.000	1.162.838.000	1.009.894.000	1.032.467.000	1.219.691.000
3	Bumi Jaya	944.955.000	1.181.505.000	1.029.720.000	1.295.684.000	1.272.518.000
4	Trimo Mukti	1.049.463.000	1.044.402.000	1.183.173.000	1.075.829.000	984.989.000
5	Titiwangi	1.016.081.000	1.049.640.000	1.373.265.000	1.645.695.000	1.482.826.000

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui dana desa yang diterima oleh masing-masing desa mengalami fluktuasi tiap tahunnya. Desa Titiwangi menjadi desa dengan penerimaan dana desa tertinggi pada tahun 2024 sebesar Rp1.645.695.000, sedangkan Desa Rawa Selapan menerima dana desa terendah pada tahun 2021 sebesar Rp929.559.000. Besarnya dana desa tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perhatian besar terhadap pembangunan desa di Kecamatan Candipuro. Di sisi lain, agar suatu program benar-benar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di lingkungan setempat, program tersebut harus dikelola secara efektif. Namun, masih banyak kendala yang harus diatasi dalam hal pengelolaan dana desa, terutama terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah desa dan keterlibatan masyarakat dalam memantau penggunaan dana tersebut. Salah satu indikator jelas dari masalah ini adalah fakta bahwa jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Kecamatan Candipuro bervariasi dari tahun ke tahun. Program BLT-DD diberikan kepada masyarakat kurang mampu sebagai bentuk perlindungan sosial, terutama pada masa pandemi Covid-19. Berikut data jumlah penerima BLT-DD tahun 2020-2025:

Tabel 2 Jumlah Masyarakat Yang Menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan

No	Desa	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Rawa Selapan	58 KK	58 KK	120 KK	25 KK	12 KK	23 KK
2	Bumijaya	150 KK	31 KK	132 KK	30 KK	15 KK	8 KK
3	Titiwangi	124 KK	68 KK	117 KK	35 KK	29 KK	8 KK
4	Beringin Kencana	207 KK	231 KK	132 KK	42 KK	8 KK	28 KK
5	Trimomukti	178 KK	30 KK	120 KK	42 KK	10 KK	15 KK

Sumber : Observasi di Kecamatan Candipuro Lampung Selatan (2025)

Pada tahun 2020 dan 2021 jumlah penerima bantuan cenderung meningkat akibat dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Jumlah orang yang menerima bantuan mulai berkurang pada tahun berikutnya seiring membaiknya kondisi keuangan desa, dan dana tersebut juga dialokasikan untuk pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Semua hal ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa agar bantuan dapat sampai kepada penerima manfaat yang dituju dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Selain itu, perkembangan status desa di Kecamatan Candipuro juga menunjukkan adanya peningkatan pembangunan desa. Berdasarkan data rekapitulasi status desa tahun 2026, sebagian besar desa di Kecamatan Candipuro telah berada pada kategori desa maju dan mandiri.

Tabel 3 Rekapitulasi Status Desa di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan tahun 2026

No	Nama Desa	Status Desa
1	Banyumas	Maju
2	Batuliman Indah	Maju
3	Beringin Kencana	Mandiri
4	Bumijaya	Mandiri
5	Cinta Mulya	Mandiri
6	Karya Mulya Sari	Maju
7	Rantau Minyak	Maju
8	Rawa Selapan	Mandiri
9	Sido Asri	Maju
10	Sinar Palembang	Maju
11	Sinar Pasemah	Maju
12	Titiwangi	Mandiri
13	Trimomukti	Maju
14	Way Gelam	Maju

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lampung Selatan

Dilihat pada tabel di atas, dapat dikatakan dari 14 desa di Kecamatan Candipuro terdapat 9 desa berstatus maju dan 5 desa berstatus mandiri. Status desa tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa di Kecamatan Candipuro mengalami perkembangan yang cukup baik. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pengelolaan dana desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan pelayanan publik. Namun demikian, keberhasilan pembangunan desa tetap memerlukan pengelolaan dana desa yang akuntabel serta partisipasi masyarakat yang aktif agar pembangunan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Selain itu, Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan menemukan sejumlah masalah dalam pengelolaan dana desa, termasuk pelaporan yang tidak konsisten, keterlibatan masyarakat yang kurang memadai, serta kurangnya pengawasan yang ketat. Mengingat keadaan tersebut, jelaslah bahwa pengelolaan ADD harus ditingkatkan dalam dua aspek utama: akuntabilitas dan keterlibatan masyarakat.

Studi terdahulu memperlihatkan akuntabilitas serta partisipasi masyarakat ada pengaruhnya pada efektivitas pengelolaan dana desa serta kesejahteraan masyarakat. Salah satunya yakni studi (Abimanyu, 2024) Desa Midang, Lombok Barat, menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dan akuntabilitas dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa. Penelitian oleh (Mani, 2024) menunjukkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana desa ada pengaruhnya signifikan pada kesejahteraan Masyarakat. Namun temuan sebelumnya masih menunjukkan adanya perbedaan temuan serta masih terbatasnya studi yang dilaksanakan di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.

Oleh karena itu, studi ini sangat krusial untuk dilaksanakan guna menganalisa “pengaruh akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dan partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan”.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Keagenan (Agency Theory)

Menurut teori agensi, seorang prinsipal dan seorang agen menjalin hubungan yang mengikat secara hukum. Agen adalah pihak yang bertugas melaksanakan kehendak prinsipal,

sedangkan prinsipal adalah pihak yang memberikan wewenang kepada agen untuk melakukan hal-hal tertentu dan berhak menilai seberapa baik agen tersebut melaksanakannya (Jensen & Meckling, 1976).

Teori agensi menjelaskan bahwa dalam hubungan antara principal dan agent dapat muncul permasalahan karena adanya perbedaan kepentingan serta ketidakseimbangan informasi (information asymmetry). Pemerintah desa sebagai pengelola dana desa memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang apabila tidak disertai dengan akuntabilitas dan pengawasan yang baik. Dengan demikian, partisipasi masyarakat sangat esensial, dan para pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa harus dimintai pertanggungjawaban agar dana tersebut digunakan sesuai dengan keinginan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam studi ini, teori agensi digunakan untuk menguraikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Untuk memaksimalkan pencapaian tujuan pembangunan desa, penting bagi pemerintah desa untuk dapat dipertanggungjawabkan dan agar masyarakat desa turut terlibat secara aktif. Hal ini akan membantu mencegah ketidakkonsistenan dalam pengelolaan keuangan desa.

Stewardship Theory

Teori Stewardship pertama kali diperkenalkan oleh Donaldson dan Davis (1991), serta kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Donaldson et al. (1997). Stewardship Theory menjelaskan bahwa pemerintah desa sebagai pengelola dana desa memiliki tanggung jawab untuk bekerja demi kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi. Pemerintah desa sebagai steward diharapkan mampu mengelola dana desa secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Teori stewardship menekankan bahwa aparatur desa pada dasarnya memiliki komitmen untuk menjalankan amanah masyarakat dengan baik. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa akan meningkat seiring dengan efektivitas inisiatif pembangunan desa, asalkan dana desa dikelola secara bertanggung jawab. Dengan demikian, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, keterlibatan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat pun akan semakin ditingkatkan melalui penerapan filosofi penatalayanan.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat bergantung pada empat pilar utama, yaitu kemakmuran ekonomi, pendidikan publik yang berkualitas, kesehatan yang baik, dan kondisi sosial yang harmonis. Tujuan utama pengelolaan dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dipercayai bahwa pengelolaan dana desa yang lebih baik akan menghasilkan pendapatan yang lebih besar bagi masyarakat, infrastruktur yang lebih memadai, akses yang lebih mudah ke layanan kesehatan dan pendidikan, serta lingkungan hidup yang secara keseluruhan lebih baik. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan dana desa dapat dilihat dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa. Indikator kesejahteraan masyarakat menurut (Ussholehah & Anggoro, 2024) terdiri dari pendidikan, kesehatan dan pendapatan.

Akuntabilitas Dana Desa

Pemerintah desa bertanggung jawab kepada masyarakat apabila mengelola keuangan desa secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena dana tersebut merupakan uang negara yang diperuntukkan bagi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, akuntabilitas dalam pengelolaannya menjadi hal yang sangat penting.

Pemerintah desa dituntut untuk mampu melaksanakan program sesuai perencanaan, menyusun laporan keuangan secara jelas, serta memberikan informasi penggunaan dana desa kepada masyarakat secara terbuka. Pengelolaannya dana desa yang akuntabel bisa membuat peningkatan pada kepercayaan masyarakat, meminimalisir penyalahgunaan anggaran, dan

meningkatkan efektivitas pembangunan desa. Indikator akuntabilitas menurut (Ussholehah & Anggoro, 2024) yaitu akuntabilitas program, akuntabilitas kinerja dan transparansi.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat ini menandakan keterlibatan warga desa dalam seluruh tahap pembangunan, mulai dari perancangan program hingga evaluasi program. Kebutuhan desa hanya dapat dipenuhi secara memadai dengan masukan dari para warganya, yang memiliki pengalaman paling langsung terkait kebutuhan tersebut. Dengan bantuan masyarakat, pemerintah desa dapat memantau penggunaan keuangan desa dengan lebih baik serta mengusulkan rencana pembangunan spesifik yang akan dilaksanakan. Partisipasi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, transparansi, dan responsivitas pembangunan desa terhadap kebutuhan masyarakat. Indikatornya partisipasi masyarakat pendapat (Ussholehah & Anggoro, 2024) meliputi “partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam penerimaan dan pemanfaatan hasil, partisipasi dalam pengawasan dan penilaian”.

METODE PENELITIAN

Studi ini memakai pendekatan kuantitatif yang mempunyai sifat deskriptif dan dapat diverifikasi. Penduduk Kecamatan Candipuro di Kabupaten Lampung Selatan menjadi populasi dalam studi ini. Data primer merupakan sumber utama dipakai peneliti untuk memperoleh temuan-temuan. Ketika seorang peneliti membutuhkan informasi tertentu, mereka biasanya mengandalkan sumber data primer untuk mendapatkan informasi (Sugiono, 2019). Kuesioner dibagikan pada partisipan yang diwawancarai baik secara tertulis maupun lisan guna menghimpun data. Partisipan yang mengisi kuesioner tersebut adalah warga yang tinggal di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan. Warga yang sudah memahami atau secara aktif terlibat dalam pengelolaan dana desa menjadi subjek purposive sampling dipakai pada studi ini. Penentuan jumlahnya sample minimum pada studi ini mengacu pada rumusnya Hair et al. (2010):

$N = 10 \times \text{jumlahnya indikator dipakai}$

Dengan jumlah indikator sebanyak 10, maka diperoleh:

$N = 10 \times 10 = 100$

Dengan demikian, jumlah minimum sample dipakai pada studi ini yakni 100 partisipan.

Teknik penghimpunan data pada studi ini dilaksanakan dengan Kuesioner (Angket), Observasi (Pengamatan), dokumen dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penelitian

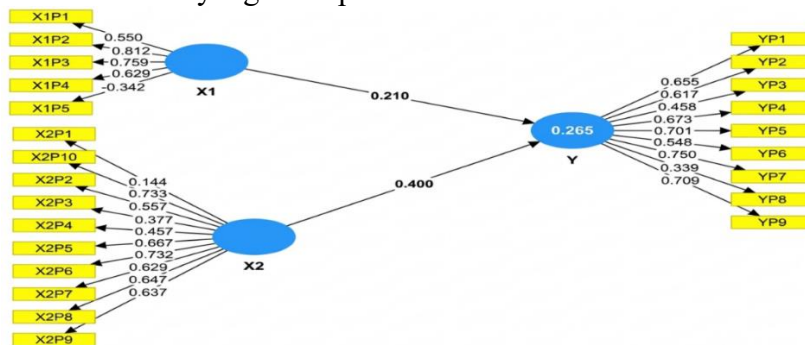
Tujuannya studi ini untuk menganalisis pengaruhnya akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa serta partisipasi masyarakat pada kesejahteraan masyarakat. Anggota masyarakat yang mempunyai keahlian dan keterlibatan dalam pengelolaan keuangan desa disurvei melalui kuesioner untuk mengumpulkan data untuk studi ini. Jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan merupakan beberapa profil partisipan yang dianalisa guna menggambarkan komposisi masyarakat dalam studi ini.

Variabel yang dipakai pada studi ini terdiri dari akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai variable independent (X1), partisipasi masyarakat sebagai variable independent (X2), serta kesejahteraan masyarakat sebagai variable dependent (Y). Datanya didapat dari hasil kuesioner kemudian diolah menggunakan metodologi PLS menjadi alat analisis dengan memakai SmartPLS 4. Metodologi PLS dipilihnya karena dapat menganalisa hubungannya antar variabel laten secara bersamaan serta sesuai dipakai pada jumlahnya sampel relatif terbatas.

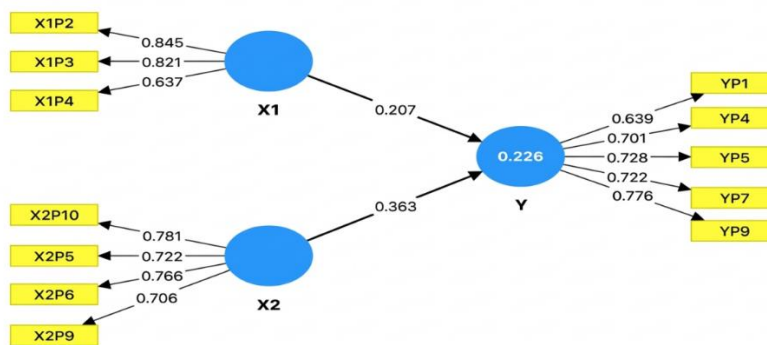
Dalam analisa PLS ada dua tahapan evaluasi model, yakni *outer model (measurement model)* dan *inner model (structural model)*. Outer model digunakan untuk menguji kualitas instrumen penelitian, sedangkan inner model dipakai guna menguji hubungannya antar variable laten pada model riset.

Analisis Data

Dalam studi ini, analisa dilaksanakan dengan membandingkan model pada tahap pra-eliminasi dan pasca-eliminasi indikator. Tahap pra-eliminasi menunjukkan kondisi awal model sebelum dilakukan penyempurnaan, sedangkan tahap pasca-eliminasi merupakan model akhir setelah indikator yang belum memenuhi kriteria dikeluarkan dari analisis. Model pasca-eliminasi inilah yang kemudian digunakan untuk pengujian hipotesis karena telah memenuhi kriteria Fit Model yang ditetapkan.



Gambar 1 Full Model Structural Pra Eliminasi



Gambar 2 Full Model Structural Pasca Eliminasi

Berdasarkan temuan pengujiannya *outer model*, ada beragam indikatornya mempunyai nilai *outer loading* tidak melebihi 0,70 sehingga belum memenuhi kriteria validitas konvergen dan perlu dieliminasi. Rendahnya nilai *loading* memperlihatkan indikatornya tersebut belum mampu merepresentasikan variabel penelitian secara optimal, yang disebabkan oleh perbedaan pemahaman responden maupun kondisi lapangan. Setelah dilakukan eliminasi dan pengujian ulang, seluruh indikatornya tersisa mempunyai nilai *loading* melebihi 0,70 hingga model penelitian dikatakan valid serta reliabel untuk digunakan pada tahapan analisa selanjutnya. Karena *loading factor* yang menunjukkan nilai >0,70, artinya telah memenuhi kriterianya validitas serta bisa merepresentasikannya variable studi dengan lebih akurat.

Analisis Inferensial

1. Analisis *Outer Model* (*Measurement Model*)

Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Tabel 4 Hasil Loading Factor

<i>Outer Loading</i>	Akuntabilitas pengelolaan	Partisipasi Masyarakat	Kesejahteraan Masyarakat
X1P2	0,845		
X1P3	0,821		
X1P4	0,637		
X2P5		0,722	
X2P6		0,766	
X2P9		0,706	
X2P10		0,781	
YP1			0,639
YP4			0,701
YP5			0,728
YP7			0,722
YP9			0,776

Sumber : Olah data SEM PLS4 (2026)

Setelah dilakukan pengujian memakai SmartPLS 4, temuan evaluasi *outer model* menunjukkan keseluruhan indikatornya tersaji pada tabel telah memenuhi kriteria *Convergent Validity*, yaitu indikatornya dikatakan valid bila *outer loading* > 0,60 (Ghozali, 2021).

Selanjutnya, analisis validitas konvergen juga dilihat melalui nilainya AVE. Nilai AVE digunakan untuk menilai seberapa besar konstruk bisa memberi penjelasan varians indikatornya, dengan kriterianya AVE melebihi 0,50 (Ghozali, 2021).

Tabel 5 Hasil *Average Variance Extrancted* (AVE)

Variable	<i>Average Variance Extrancted</i> (AVE)
Akuntabilitas pengelolaan ADD	0,598
Partisipasi Masyarakat	0,554
Kesejahteraan Masyarakat	0,510

Sumber : Olah data SEM PLS4 (2026)

Nilai AVE untuk variabel Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa besaran 0,598, variable Partisipasi Masyarakat besaran 0,554, serta variable kesejahteraan masyarakat besaran 0,510. Pendapat Ghozali (2021), suatu konstruk dikatakan memenuhinya validitas konvergen bila nilainya AVE > 0,50. Maka dari itu, ketiga variable ini dinyatakan memenuhi kriterianya *Convergent Validity*. Artinya, masing-masing konstruk dapat menjelaskan >50% varians indikator-indikatornya.

Uji Reliabilitas

Tabel 6 Hasil *Cronbach's Alpha*

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>
Akuntabilitas pengelolaan ADD	0,662
Partisipasi Masyarakat	0,733
Kesejahteraan Masyarakat	0,774

Sumber: Olah data SEM PLS 4 (2026)

Variabel Akuntabilitas Pengelolaan ADD memperoleh nilai 0,662, Partisipasi Masyarakat memperoleh nilai 0,733, dan Kesejahteraan Masyarakat besaran 0,774. Ini memperlihatkan ketiga variabel sudah memenuhi kriteria reliabilitas serta mempunyai

tingkatan konsistensi internal yang baik karena nilainya *Cronbach's Alpha* variabel tersebut melebihi 0,60.

Tabel 7 Hasil *Composite Reliability*

Variabel	<i>Composite Reliability</i>
Akuntabilitas pengelolaan ADD	0,815
Partisipasi Masyarakat	0,832
Kesejahteraan Masyarakat	0,839

Sumber: Olah data SEM PLS 4 (2026)

Seluruh variable mempunyai nilainya *Composite Reliability* melebihi 0,60. Nilainya *Composite Reliability* masing-masing variable yakni 0,815; 0,832; dan 0,839 menunjukkan bahwa setiap konstruk pada studi ini mempunyai tingkatan reliabilitas baik.

2. Analisis Inner Model (*Structural Model*)

Analisis *R-square*

Tabel 8 Hasil Nilai *R-square*

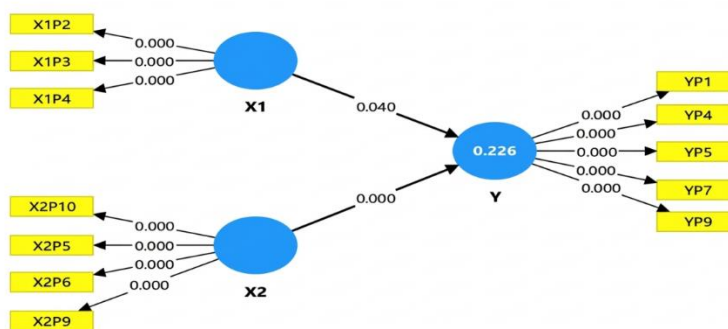
Variabel Endogen	<i>R-square</i>	<i>R-square Adjusted</i>
Kesejahteraan Masyarakat	0,226	0,210

Sumber: Olah data SEM PLS 4 (2026)

Nilai *R-square* besaran 0,226 memperlihatkan variabel Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat bisa memberi penjelasan variable Kesejahteraan Masyarakat besaran 22,6%, sementara angka sisa 77,4% dipengaruhi oleh variable lain di luar model studi ini. Nilai 0,226 masuk pada kategorinya lemah, karena tidak melebihi 0,25. Ini memperlihatkan meskipun Akuntabilitas serta Partisipasi Masyarakat dapat memberi pengaruh pada Kesejahteraan Masyarakat, namun masih terdapat banyak faktor lainnya memengaruhi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan yang tidak dikaji pada studi ini. Nilainya *R-square Adjusted* senilai 0,210 menunjukkan temuan tidak jauh berbeda dari *R-square*, sehingga model studi ini tetap bisa digunakan untuk memberi penjelasan hubungannya antar variabel, meskipun dengan tingkatan kontribusi yang relatif rendah.

Uji Hipotesis

Gambar 3 Hasil Model Penelitian



Sumber: Olah data SEM PLS 4 (2026)

Pengujian dilakukan dengan melihat nilainya *t-statistic* dan *p-values*. Kriteria pengambilan keputusannya yakni:

Apabila *t-statistic* > 1,96 serta *p-values* < 0,05, hipotesis diterima (signifikan).

Apabila *t-statistic* < 1,96 serta *p-values* > 0,05, hipotesis ditolak (tidak signifikan).

Tabel 9 Hasil Uji Hipotesis

Variabel	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	STDEV	<i>T-Statistic</i>	<i>P-Values</i>	Hasil
X1 → Y	0,207	0,229	0,101	2,050	0,040	Signifikan
X2 → Y	0,363	0,386	0,085	4,280	0,000	Signifikan

Sumber: Olah data SEM PLS 4 (2026)

1. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hubungan antara Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Kesejahteraan Masyarakat menunjukkan nilai *tstatistic* > 1,96 serta *p-values* < 0,05 (jika sesuai output), sehingga hipotesis diterima. Nilai koefisien jalur (original sample) yang bernilai positif memperlihatkan semakin baik akuntabilitas pada pengelolaan Alokasi Dana Desa, maka kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat. Ini dapat dikatakan transparansi, pelaporan, serta pertanggungjawaban pengelolaan dana desa berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kecamatan Candipuro.

2. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hubungan antara Partisipasi Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat memiliki nilai *tstatistic* > 1,96 serta *p-values* < 0,05 (jika sesuai output), sehingga hipotesis diterima. Koefisien jalur yang bernilai positif memperlihatkan semakin tinggi tingkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan ADD, semakin meningkat pula kesejahteraan Masyarakat Desa. Ini memperlihatkan keterlibatan aktif masyarakat pada proses pengelolaan dana desa menjadi faktor esensial dalam mendorong peningkatan kesejahteraan, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun kondisi sosial masyarakat.

KESIMPULAN

Melihat temuan analisis data serta pembahasan studi terkait “pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat”, dapat dibuat kesimpulan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif signifikan pada Kesejahteraan Masyarakat. Ini ditunjukkan dengan nilai koefisien jalur yakni 0,207, nilainya T-Statistic yakni 2,050 (>1,96), serta nilainya P-Value yakni 0,040 (<0,05). Temuan menunjukkan bahwa semakin baik tingkatan akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa, maka semakin meningkat pula kesejahteraan masyarakat. Akuntabilitas yang baik mendorong transparansi, efektivitas program, serta kepercayaan masyarakat pada pemerintah desa. Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif signifikan pada Kesejahteraan Masyarakat. Dilihat dari nilai koefisiennya jalur yakni 0,363, nilai T-Statistic besaran 4,280 (>1,96), serta nilainya P-Value yakni 0,000 (<0,05). Dengan kata lain, potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat berbanding lurus dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Berdasarkan temuan studi ini, keterlibatan masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa merupakan komponen penting dalam meningkatkan kualitas hidup di daerah pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- (1976), J. & M. (n.d.). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Return. *Australian Journal Of Management*. Juni 1991, 49-65.
- Abimanyu, G. G. (2024). Accountability and Community Participation In Village Fund Management : A Case Study Of Midang Village, West Lombok. *Mandalika Journal of Economics and Business (MJEB)*, 1(3), 105-113.
- Imam Ghozali. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program*

- SmartPLS 3.0. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- James H. Davis, F. David Achoorman, L. D. (1997). *Toward A Stewardship Theory Of Management*.
- Joseph F. Hair Jr., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate Data Analysis (7th ed.)*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Mani, C. N. (2024). The Effect of Transparency and Accountability of Village Fund Management on Community Welfare. *5(7)*, 2565-2576.
- Permendes. (2020). *Permendesa PDTT, 2020. Permendesa PDTT, 2020*.
- Sesariya, F. V., & Utami, S. S. (2024). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa , Kebijakan Desa , dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen Universitas Slamet Riyadi , Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 . 3.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ussholehah & Anggoro, (2024). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa, transparansi, partisipasi masyarakat, kelembagaan dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan. *35(2)*, 103-118.